



Pemerintah Kota Banjarbaru

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

**DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2024 Dinas Sosial Kota Banjarbaru.

Dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan diperlukan sistem penanganan kesejahteraan sosial yang sistematis dan berkelanjutan. Dalam melakukan perencanaan pembangunan Kota Banjarbaru pada sektor kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan, Dinas Sosial Kota Banjarbaru telah melakukan upaya-upaya perencanaan, pembangunan sarana dan prasarana pendukung.

Untuk mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan pada tahun 2023 perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Kinerja (Renja) yang disusun ini merupakan acuan dalam pembangunan Kota Banjarbaru sektor kesejahteraan sosial pada tahun 2024.

Disadari bahwa manusia memiliki kemampuan yang terbatas, oleh karenanya dalam pembuatan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2024 ini sangat wajar jika terdapat kekurangan, dan tentunya diharapkan ada saran dan kritik guna perbaikan di masa mendatang.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada semua pihak yang telah bekerjasama dan membantu penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2024 ini.

Mudah-mudahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2024 ini dapat bermanfaat khususnya bagi pelaksana dan pihak-pihak yang memerlukan informasi.

Banjarbaru, Februari 2023



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematis Penulisan	4
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	18
2.3 Isu-isu Penting Pelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	29
 BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	 39
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	39
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kota Banjarbaru	39
3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kota Banjarbaru	40
 BAB IV PENUTUP	 47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat dokumen rencana pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung SKPD.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Tahunan pada level Satuan Organisasi Perangkat Daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SOPD dalam satu tahun anggaran dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SOPD sesuai Tupoksinya.

Dinas Sosial Kota Banjarbaru sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru telah melaksanakan kebijakan di bidang sosial.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan perencanaan, peningkatan sumber daya dan sarana prasarana dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat lebih baik dalam aspek peningkatan pendapatan perekonomian masyarakat atau peningkatan indeks intelektual manusia.

Untuk melaksanakan program pembangunan tahun 2024, maka diperlukan kebijakan dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024 berdasarkan kebutuhan yang berorientasi skala prioritas sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 43 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5589)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Banjarbaru Tahun 2011-2031;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 7).

1.3 Maksud dan Tujuan

Secara umum maksud penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024 adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan serta indikator kinerja dan pagu indikatif masing - masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 1 (satu) tahun mendatang

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024 adalah untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Sosial Kota Banjarbaru dalam turut mendukung suksesnya pencapaian susunan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk Rencana Strategi (Renstra) Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun 2021 -2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SOPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SOPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun n dan Prakiraan Maju Tahun n+

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial.

Evaluasi pelaksanaan renja Dinas Sosial Kota Banjarbaru mengacu pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan tantangan dan peluang yang ada di Kota Banjarbaru. Visi pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periode 2021- 2026 adalah “**BANJARBARU MAJU, AGAMIS DAN SEJAHTERA**”.

Visi tersebut mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Maju adalah komitmen untuk menjadikan Banjarbaru mempunyai daya saing dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi
 2. Agamis terwujudnya masyarakat Banjarbaru yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur
 3. Sejahtera adalah sumber daya manusia yang berkualitas, menumbuhkan kembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan pemerintah yang baik.
- Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi .

Rumusan misi membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021 – 2026, maka misi pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia
2. Meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan local dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Evaluasi pelaksanaan renja Dinas Sosial Kota Banjarbaru tahun lalu dan capaian renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian

target renstra SKPD berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan renja SKPD tahun sebelumnya.

Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun 2022 melaksanakan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, yang dijabarkan dalam 5 Program dan di implementasikan dalam bentuk 15 Kegiatan dan 35 sub kegiatan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.1
PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN REALISASINYA DINAS SOSIAL KOTA
BANJARBARU TAHUN 2022

No	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan :	100%	100%	100%
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan :	100%	100%	100%
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	2 dok	100%
	2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 lap	2 lap	100%
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan	100%	100%	100%
	1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	24 org	24 org	100%
	2. Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	1 lap	100%
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan	100%	100%	100%
	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28 jenis	28 jenis	100%
	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34 jenis	34 jenis	100%
	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.023 lbr	10.023 lbr	100%
		6.437 lbr	6.437 lbr	100%
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080 eks	1.080 eks	100%
	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49 lap	49 lap	100%
	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Sub Kegiatan :	100%	100%	100%
	1. Pengadaan Mebel	3 buah	3 buah	100%
	2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 buah	3 buah	100%
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan	100%	100%	100%
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis	3 jenis	100%
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 org	2 org	100%
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan :	100%	100%	100%
	1. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	1 unit	1 unit	100%

	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14 unit 6 buah 1 gedung 3 paket	14 unit 6 buah 1 gedung 3 paket	100% 100% 100% 100%
2.	Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan 1. Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 2. Pengembangan Sumber Potensi Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kecamatan Kabupaten/Kota 2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota 3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kecamatan Kabupaten/Kota 4. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga [LK3]	100% 100% 15 izin 100% 12 unit 5 org 3 SLRT 1 unit	100% 100% 15 izin 100% 12 unit 5 org 3 SLRT 1 unit	100% 100% 100% 100% 100% 100%
3.	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan : 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Permakanan 2. Penyediaan Alat Bantu 3. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 4. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 5. Pemberian Layanan Kedaruratan 6. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial [PMKS] Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Lar Panti Sosial Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Permakanan	100% 100% 125 org 25 org 65 org 12 bulan 15 org 60 org 100% 150 org	100% 100% 125 org 25 org 65 org 12 bulan 15 org 60 org 100% 150 org	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan : 1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Sub Kegiatan : 1. Rujukan Anak-Anak Terlantar 2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	100% 100% 30 org 100% 4.390 org 2.572 keluarga	100% 100% 30 org 100% 4.390 org 2.572 keluarga	100% 100% 100% 100% 100% 100%

5.	Program Penanganan Bencana	100%	100%	100%
	Kegiatan :			
	1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan :			
	1. Penyediaan Makanan	3.500 org	3.500 org	100%
	2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan :			
	1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	28 org	28 org	100%

Dari 5 (lima) Program 14 Kegiatan, 35 Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Banjarbaru pada tahun 2022 ada Kegiatan yang belum tercapai target yang direncanakan yaitu :

1. Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Penyediaan alat bantu target 25 buah tidak terealisasi karena penyediaan alat bantu pada tahun 2022 dianggarkan melalui rekening hibah/bansos. Berdasarkan regulasi untuk pelaksanaannya harus terlebih dahulu mengusulkan daftar nama penerima hibah dan akan diserahkan pada tahun berikutnya, namun penerima yang sudah diusulkan telah mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sehingga tidak ada lagi penerima hibah pada tahun 2022.

Berikut penjabaran rekapitulasi hasil pelaksanaan Rencana Kinerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru sampai dengan Tahun 2022 dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Banjarbaru
dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Kota Banjarbaru s/d Tahun 2022 Kota Banjarbaru

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bidang Sosial Urusan Wajib										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Sub Kegiatan										
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja Pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	2 laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 laporan	2 laporan	100%	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Sub Kegiatan										
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	50 orang	24 orang	24 orang	24 orang	100%	50 Orang	50 Orang	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun di akhir tahun sesuai ketentuan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Sub Kegiatan										
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	0	0	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Sub Kegiatan										
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia	2 paket	28 jenis	28 jenis	28 jenis	100%	2 paket	2 paket	100%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	4 paket	34 jenis	34 jenis	34 jenis	100%	2 paket	2 paket	100%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pengadaan yang tersedia	2 paket	6.437 lbr 10.023 lbr	6.437 lbr 10.023 lbr	6.437 lbr 10.023 lbr	100%	2 paket	2 paket	100%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan atau buku peraturan yang tersedia	3 dokumen	1.080 eks	1.008 eks	1.008 eks	100%	3 dokumen	3 dok	100%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	64 laporan	49 laporan	49 laporan	49 laporan	100%	49 Laporan	49 Laporan	100%	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Sub Kegiatan										
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang dibeli	5 unit	3 buah	3 buah	3 buah	100%	5 Unit	5 Unit	100%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	7 unit	3 buah	3 buah	3 buah	100%	4 unit	4 unit	100%	
	Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Sub Kegiatan										
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan lainnya yang dapat digunakan	3 laporan	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 laporan	3 laporan	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai administrasi kantor non ASN aktif	66 laporan	2 orang	2 orang	2 orang	100%	66 Laporan	66 Laporan	66 Laporan	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	14 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	14 Unit	14 Unit	14 Unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	31 Unit	6 Buah	6 Buah	6 Buah	100%	25 Unit	25 Unit	25 Unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor / bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	1 gedung	1 Gedung	1 Gedung	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor / bangunan lainnya	14 Unit	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%
2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Keluarga, Tenaga Sumber Kesejahteraan Kelembagaan Masyarakat dan LK3 yang Memperoleh fasilitas peningkatan kemampuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan										
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah rekomendasi izin undian gratis berhadiah pengumpulan uang atau barang yang diterbitkan	15 Dokumen	15 Izin	15 izin	15 Izin	100%	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Pengembangan Sumber Potensi Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang ditingkatkan kemampuannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan										
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM yang ditingkatkan kemampuannya	45 Orang	12 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	45 orang	45 orang	45 orang	100%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100%	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang ditingkatkan kemampuannya	6 Lembaga	3 SLRT	3 SLRT	3 SLRT	100%	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	100%
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah LK3 yang dibina	30 Sertifikat	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	15 Sertifikat	15 Sertifikat	15 Sertifikat	100%
3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Persentase bantuan pemenuhan kebutuhan dasarnya yang diberikan diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan										100%
	Penyediaan Permakanan	Jumlah permakanan yang disediakan bagi penyandang Disabilitas Terlantar , anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng menerima paket permakanan	133 Orang	125 orang	125 Orang	125 Orang	100%	175 Orang	175 Orang	175 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah alat bantu yang diberikan kepada penyandang disabilitas	15 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	100%	12 Orang	12 Orang	12 Orang	100%
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, dan sosial	-	65 Orang	65 Orang	65 Orang	100%	-	-	-	-
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Peyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah bimbingan social yang dilaksanakan kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat	50 Orang	-	-	-	-	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100%
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang miskin dan terlantar yang diberi pelayanan kedaruratan	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	100%	15 Orang	15 Orang	15 Orang	100%
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan										
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewengana Kab./Kota	20 orang	-	-	-	-	15 Orang	15 Orang	15 Orang	100%
	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang menerima paket permakanan di rumah singgah	-	150 Orang	150 Orang	150 Orang	100%	150 Orang	150 Orang	150 Orang	100%
	Pemberian Layanan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kab./Kota	10 Orang	-	-	-	-	4 Orang	4 Orang	4 Orang	100%
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	20 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	100%	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100%

	Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan eunifikasi keluarga kewenangan Kab./Kota	20 Orang	-	-	-	-	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100%
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kab./Kota	20 Orang	-	-	-	-	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100%
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kewenangan Kab. / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kab./Kota	3 Dokumen	-	-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase anak terlantar yang dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang dipelihara di Kota Banjarbaru	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan										
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang dijangkau kewenangan Kab./Kota	25 orang	-	-	-	-	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100%
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapat rujukan kewenangan Kab./Kota	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	100%	316 Orang	316 Orang	316 Orang	100%
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data fakir miskin yang dikelola	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan										
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab./Kota	Jumlah fakir miskin cakupan daerah Kab./Kota yang didata	7.726 Orang	-	-	-	-	7.726 Orang	7.726 Orang	7.726 Orang	100%
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kab./Kota	4.390 Keluarga	4.390 Orang	4.390 Orang	4.390 Orang	100%	4.390 Keluarga	4.390 Keluarga	4.390 Keluarga	100%
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarha penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kab./Kota	2.572 Keluarga	-	-	-	-	2.580 Keluarga	2.580 Keluarga	2.580 Keluarga	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan										
	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat	3.500 Orang	3.500 Orang	3.500 Orang	3.500 Orang	100%	4.000 Orang	4.000 Orang	4.000 Orang	100%
	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana Kewenangan Kab./Kota	70 Orang	-	-	-	-	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100%
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat pengungsian kewenangan Kab./Kota	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Kab./Kota	80 orang	-	-	-	-	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100%
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana alam dan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan										
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial atau relawan sosial yang tersedia	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	100%	30 Orang	30 Orang	30 Orang	100%

Anggaran dan realisasi belanja Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun 2022 dirinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.3
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA
DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU
TAHUN 2022

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Saldo (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.732.748.680	4.439.382.353	1.293.366.327	77,44%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.480.500	45.480.500	0	100%
	Sub Kegiatan				
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.564.000	25.564.000	0	100%
	2 Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD	19.916.500	19.916.500	0	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.919.478.400	2.819.878.761	1.099.599.639	71,95%
	Sub Kegiatan				
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.916.178.400	2.816.578.761	1.099.599.639	71,92%
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	3.000.000	0	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	910.847.780	732.836.586	178.011.194	80,46%
	Sub Kegiatan				
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.498.780	5.485.000	13.780	99,75%
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	151.077.000	138.836.000	12.241.000	91,90%
	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000	8.000.000	0	100%
	4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.860.000	4.858.000	2.000	99,96%
	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	740.612.000	574.857.586	165.754.414	77,62%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	325.950.000	323.982.000	1.968.000	99,40%
	Sub Kegiatan				
	1 Pengadaan Mebel	79.086.000	79.086.000	0	100%
	2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	246.864.000	244.896.000	1.968.000	99,20%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	138.744.000	130.244.320	8.499.680	93,87%
	Sub Kegiatan				
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	117.144.000	108.644.320	8.499.680	93,87%
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.600.000	21.600.000	0	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	392.248.000	386.960.186	5.287.814	98,65%
	Sub Kegiatan				
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.400.000	39.039.800	360.200	99,09%
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.630.000	85.404.900	3.225.100	96,36%
	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.268.000	20.030.000	1.238.000	94,18%
	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	237.950.000	237.535.486	414.514	99,83%
	5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	4.950.000	50.000	99,00%

II	Program Pemberdayaan Sosial	147.600.250	133.688.750	13.911.500	90,57%
	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	23.503.000	23.503.000	23.503.000	100%
	Sub Kegiatan				
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	23.503.000	23.503.000	23.503.000	100%
	Kegiatan Pengembangan Sumber Potensi Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota	124.097.250	110.185.750	13.911.500	88,79%
	Sub Kegiatan				
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	30.238.250	27.538.250	2.700.000	91,07%
	1 Kewenangan Kabupaten/ Kota				
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial	36.000.000	35.650.000	350.000	99,03%
	2 Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota				
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	38.499.000	33.090.000	5.409.000	85,95%
	3 Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota				
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan	19.360.000	13.907.500	5.452.500	71,84%
	4 Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)				
III	Program Rehabilitasi Sosial	1.573.032.750	1.369.131.450	203.901.300	87,04%
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.530.799.750	1.327.573.450	203.226.300	86,72%
	Sub Kegiatan				
	1 Penyediaan Permakanan	948.664.750	887.975.750	60.689.000	93,60%
	2 Penyediaan Alat Bantu	53.180.000	46.752.800	6.427.200	87,91%
	3 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	21.788.500	21.128.000	660.500	96,97%
	4 Pemberian Bimbingan Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	399.899.000	276.436.900	123.462.100	66,13%
	5 Pemberian Layanan Kedaruratan	81.840.000	79.740.000	2.100.000	97,43%
	6 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	25.427.500	15.540.000	9.887.500	61,11%
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	42.233.000	41.558.000	675.000	98,40%
	Sub Kegiatan				
	1 Penyediaan Permakanan	42.233.000	41.558.000	675.000	98,40%
IV	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	917.358.000	813.954.156	103.403.844	88,73%
	Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	62.075.000	61.875.000	200.000	99,68%
	Sub Kegiatan				
	1 Rujukan Anak-Anak Terlantar	62.075.000	61.875.000	200.000	99,68%
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	855.283.000	752.079.156	103.203.844	87,93%
	Sub Kegiatan				
	1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	855.283.000	752.079.156	103.203.844	87,93%
V	Program Penanganan Bencana	509.813.000	455.314.000	54.499.000	89,31%
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	309.622.000	255.151.000	54.471.000	82,41%
	Sub Kegiatan				
	1 Penyediaan Makanan	309.622.000	255.151.000	54.471.000	82,41%
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	200.191.000	200.163.000	28.000	99,99%
	Sub Kegiatan				
	1 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	200.191.000	200.163.000	28.000	99,99%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Sosial Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan wajib bidang kesejahteraan sosial yang mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten / Kota sebagai berikut :

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Banjarbaru sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan untuk urusan kesejahteraan sosial, adalah sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti dengan indikator
 - 1) Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti dengan indikator Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti dengan indikator Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dengan indikator. Jumlah warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota dengan indikator Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial

2. Realisasi

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal terealisasi yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Banjarbaru sebagai berikut :

A. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti dengan indikator Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti terealisasi 89,33% terdiri dari :

- a) Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar 80%
- b) Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar 9,33%

Bahwa untuk Penerapan Pelayanan Minimal (SPM) di Dinas Sosial Kota Banjarbaru ada 15 indikator pencapaian mutu pelayanan dasar bidang sosial yang harus dipenuhi yaitu :

1. Layanan data dan pengaduan
2. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti
3. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru
4. Penyediaan permakanan
5. Penyediaan sandang
6. Penyediaan alat bantu
7. Penyediaan perbekalan kesehatan
8. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual
9. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar
10. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak
11. Akses layanan pendidikan
12. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
13. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
14. Layanan rujukan
15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan.

Dari 15 indikator pencapaian mutu pelayanan SPM Dinas Sosial Kota Banjarbaru terealisasi 10 indikator pencapaian mutu pelayanan saja karena

terbatasnya anggaran. Pelaksanaan yang mendukung adalah Program Rehabilitasi Sosial dengan kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti.

Sub kegiatan Penyediaan permakanaan dan penyediaan alat bantu

B. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti dengan indikator Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti terealisasi 92,% terdiri dari :

- a) Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar 80%
- b) Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar 12%

Bahwa untuk Penerapan Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten/Kota ada 15 indikator pencapaian mutu pelayanan dasar bidang sosial yang harus dipenuhi yaitu :

1. Layanan data dan pengaduan
2. Penyediaan permakanaan
3. Penyediaan sandang
4. Penyediaan alat bantu
5. Penyediaan perbekalan kesehatan
6. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual
7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas anak terlantar
8. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak
9. Akses layanan pendidikan
10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
12. Layanan rujukan
13. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti
14. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru

15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan.

Dari 15 indikator pencapaian mutu pelayanan SPM Dinas Sosial Kota Banjarbaru terealisasi 9 indikator pencapaian mutu pelayanan saja karena terbatasnya anggaran. Kegiatan yang mendukung pelaksanaan Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti yaitu :

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak terlantar, Sub kegiatan Rujukan anak-anak terlantar.

- C. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti dengan indikator Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti terealisasi 90,67% terdiri dari :

- a) Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar 80%
- b) Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar 10,67%

Bahwa untuk Penerapan Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten/Kota ada 15 indikator pencapaian mutu pelayanan dasar bidang sosial yang harus dipenuhi yaitu :

1. Layanan data dan pengaduan
2. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti
3. Penyediaan permakanan
4. Penyediaan Sandang
5. Penyediaan alat bantu
6. Penyediaan perbekalan kesehatan
7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual
8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas lanjut usia terlantar
9. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak
10. Akses ke layanan pendidikan
11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga

12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
13. Layanan rujukan
14. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan
15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru.

Dari 15 indikator pencapaian mutu pelayanan SPM Dinas Sosial Kota Banjarbaru terealisasi 8 indikator pencapaian mutu pelayanan saja karena terbatasnya anggaran. Kegiatan yang mendukung pelaksanaan Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti yaitu :

Program Rehabilitasi Sosial dengan Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti, Sub kegiatan Penyediaan permakanan dan penyediaan alat bantu

- D. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dengan indikator Jumlah warga negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.

terealisasi 92% terdiri dari :

- a) Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar 78,67%
- b) Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar 13,33%

Bahwa untuk Penerapan Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten/Kota ada 15 indikator pencapaian mutu pelayanan dasar bidang sosial yang harus dipenuhi yaitu :

1. Layanan data dan pengaduan
2. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti
3. Penyediaan permakanan
4. Penyediaan Sandang
5. Penyediaan alat bantu

6. Penyediaan perbekalan kesehatan
7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual
8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas lanjut usia terlantar
9. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak
10. Akses ke layanan pendidikan
11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
13. Layanan rujukan
14. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan
15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru.

Dari 15 indikator pencapaian mutu pelayanan SPM Dinas Sosial Kota Banjarbaru terealisasi 10 indikator pencapaian mutu pelayanan saja karena terbatasnya anggaran. Kegiatan yang mendukung pelaksanaan Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yaitu :

Program Rehabilitasi Sosial dengan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti, Sub Kegiatan Penyediaan permakanan.

- E. Perlindungan dan jaminan sosial pada tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota terealisasi 92% terdiri dari :

- a. Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar 80%
- b. Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar 12%

Bahwa untuk Penerapan Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten/Kota ada 5 indikator pencapaian mutu pelayanan dasar bidang sosial yang harus dipenuhi yaitu :

1. Layanan data dan pengaduan
2. Penyediaan permakanan
3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi
4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan
5. Pelayanan dukungan Psikososial

Dari 5 indikator pencapaian mutu pelayanan SPM Dinas Sosial Kota Banjarbaru terealisasi 3 indikator pencapaian mutu pelayanan saja karena terbatasnya anggaran. Kegiatan yang mendukung pelaksanaan Perlindungan dan jaminan sosial pada tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota yaitu :

Program Penanganan Bencana dengan kegiatan Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kab/Kota, sub kegiatan Penyediaan Makanan.

Rencana kerja Tahun 2022 merupakan tahun kelima perencanaan pada Renstra Perubahan Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun 2016 - 2021. Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial diatur berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru

Dinas Sosial Kota Banjarbaru merupakan SKPD yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Fungsi Dinas Sosial Kota Banjarbaru, adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang sosial sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
3. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan sosial;
4. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan kesejahteraan sosial;
5. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis dinas lingkup dinas sosial;
6. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Dari penjabaran analisis tersebut untuk pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Banjarbaru dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Banjarbaru

No	Indikator Kinerja (Outcome)	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Tahun 2026	Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14
1	Persentase pekerja sosial tenaga kesejahteraan sosial keluarga, tenaga sumber kesejahteraan kelembagaan masyarakat dan LK3 yang memperoleh fasilitas peningkatan kemampuan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	90,57%	-	100%	100%	
2	Persentase penyanggah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	1. Rehabilitasi sosial dasar penyanggah disabilitas terlantar di luar panti 2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti 3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase penyanggah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87,04%	-	100%	100%	
3	Persentase anak terlantar yang dipelihara Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial, kesejahteraan keluarga dan pengembangan ekonomi masyarakat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	88,73%	-	100%	100%	
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah / kota	Perlindungan sosial dan jaminan sosial pada tanggap dan paska korban bencana bagi korban bencana kab/kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89,31%	-	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Banjarbaru

Tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Banjarbaru yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam waktu satu tahun sampai lima tahun ke depan, terdapat misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 Pemerintah Kota Banjarbaru yang akan dilaksanakan :

A.MISI :

1. Misi 1 Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia dengan indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota
2. Misi 2 Meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan lokal dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan indikator :
 - Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, tenaga sumber kesejahteraan sosial keluarga, tenaga sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat dan LK3 yang memperoleh fasilitas peningkatan kemampuan.
 - Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
 - Persentase anak terlantar yang dipeliharaPersentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan pengembangan ekonomi masyarakat.

B. SASARAN

Sasaran menggambarkan hal atau kondisi yang ingin dicapai melalui rangkaian kegiatan dalam jangka waktu pertahun, persemester, pertriwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif, jelas dan terukur. Sasaran yang ingin dicapai :

- Meningkatnya Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial pada saat tanggap darurat bencana

- Meningkatnya kemampuan PSKS Kelembagaan Masyarakat dan LK3
- Meningkatnya pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti
- Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar dan fakir miskin.

C. TUJUAN.

Berdasarkan rumusan tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial Kota Banjarbaru maka strategi yang dilaksanakan untuk pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah melaksanakan perkuatan sumber daya manusia yang profesional, berahlak mulia, sopan dan santun baik dalam kelompok sosial maupun pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun tujuan dan sasaran rencana strategis Dinas Sosial Kota Banjarbaru yang mengacu pada RPJMD dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

1. Meningkatkan penanganan korban bencana
2. Menurunkan kemiskinan.

Secara umum Dinas Sosial melaksanakan penanganan dan pelayanan yang optimal kepada para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui program daerah Propinsi maupun program-program dari Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial RI). Sinergisitas penanganan bidang sosial diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk kepada masyarakat dengan fokus tujuan pelayanan bidang kesejahteraan sosial 5 (lima) tahun ke depan

Kendala atau permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Banjarbaru dalam mengimplementasikan Program dan Kegiatan sebagai berikut

1. Kurangnya Sumber Daya Manuasia yang profesional dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Kurang aktifnya lembaga kesejahteraan sosial yang ada di Kota Banjarbaru untuk meningkatkan koordinasi dan kepedulian sosialnya
3. Tingkat ekonomi PPKS di Kota Banjarbaru masih rendah.

4. Capaian realisasi program dan kegiatan yang dianggarkan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dari identifikasi terhadap masalah yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam melaksanakan urusan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, maka peningkatan kinerja organisasi kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan renstra Dinas Sosial Kota Banjarbaru 2021-2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Sosial Kota Banjarbaru pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Strategi mendorong perkembangannya tanggung jawab aparatur atas tugas tugasnya dalam melaksanakan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kopensasi (reward and punishing), dan kesejahteraan pegawai.
 - b. Peningkatan kemampuan tehknis aparat Dinas Sosial Kota Banjarbaru
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
2. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru dalam rangka mewujudkan *good governance* dilaksanakan dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas rencana pembangunan. Terutama Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang terdaftar perlu pembinaan dan, monitoring dan evaluasi sehingga dapat lebih aktif berpartisipasi, meningkat koordinasinya dan kepedulian sosialnya terhadap masyarakat yang mempunyai permasalahan sosial. Serta pemberdayaan LKS di Kota Banjarbaru melalui pembinaan dan kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Banjarbaru.
3. Permasalahan tingkat ekonomi PMKS di Kota Banjarbaru masih rendah tidak dapat bisa teratasi, karena semakin berkembangnya perekonomian semakin bertambah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, oleh itu perlu inovasi baik pemberdayaan sosial maupun kepedulian sosial untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah.
4. Strategi melakukan inovasi-inovasi dan terobosan terobosan dalam bidang NSPM sebagai bagian dari operasional perencanaan pembangunan, pendataan

dan pelaporan, penelitian dan pengembangan dilaksanakan dengan arah kebijakan:

- a. Pelayanan bidang kesejahteraan sosial melalui akurasi data dan perencanaan melalui teknologi informasi dan GIS, yang mendukung manajemen sumber daya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.
 - b. Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial guna mendukung di segala bidang.
5. Permasalahan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) diharapkan dalam melakukan penganggaran Program dan Kegiatan pada SKPD lebih terarah dan agar bisa terlaksananya pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM).

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Sosial Kota Banjarbaru

Dari Rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Banjarbaru yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Sosial untuk pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel. Artinya bahwa aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance*. Dinas Sosial merupakan salah satu SKPD yang berperan strategis dalam konstelasi pembangunan daerah yang ikut mendukung keberhasilan program kegiatan pemerintah kota Banjarbaru.

Peningkatan pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi sosial ekonomi politik di Kota Banjarbaru membutuhkan sinergitas antara semua SKPD yang ada. Konsep sinergitas itu mutlak diperlukan manakala menilai bahwa alokasi anggaran untuk Dinas Sosial sangat minim sementara program pembangunan yang teridentifikasi sangat banyak ragamnya. Diperlukan kearifan

pengambil kebijakan di level Pemerintah Kota Banjarbaru untuk melihat secara utuh demi peningkatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Secara keseluruhan, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Dinas Sosial Kota Banjarbaru

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	6.874.551.821	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			
	Kegiatan : Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100%	36.965.500	Kegiatan : Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD			
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Banjarbaru	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	2 dokumen	22.286.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Banjarbaru	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan		22.286.000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Banjarbaru	Jumlah laporan capaian kinerja Pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	2 laporan	14.679.500	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Banjarbaru	Jumlah laporan capaian kinerja Pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan		14.679.500	
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	4.825.489.321	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Banjarbaru	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan			
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Banjarbaru	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	50 org	4.819.831.321	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Banjarbaru	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu		4.819.831.321	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Banjarbaru	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun di akhir tahun sesuai ketentuan	1 dok	5.658.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Banjarbaru	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun di akhir tahun sesuai ketentuan		5.658.000	
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian perangkat daerah		Persentase ASN yang mengimplementasikan hasil bimtek dan diklatnya	100%	0	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian perangkat daerah		Persentase ASN yang mengimplementasikan hasil bimtek dan diklatnya		0	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Banjarbaru	ASN melalui diklat	5 orang	0	Berdasarkan tugas dan fungsi		Diklat		0	

	Kegiatan : barang milik daerah pada Perangkat daerah		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	24.970.000	Kegiatan : barang milik daerah pada Perangkat daerah		Persentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Disusun Sesuai Ketentuan		24.970.000	
	Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang milik daerah pada SKPD	Banjarbaru	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang milik daerah pada SKPD	1 laporan	24.970.000	Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang milik daerah pada SKPD	Banjarbaru	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang milik daerah pada SKPD		24.970.000	
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	553.498.000	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi			
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Banjarbaru	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia	2 paket	25.300.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Banjarbaru	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia		23.000.000	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Banjarbaru	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	4 paket	198.098.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Banjarbaru	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia		180.089.000	
	Penyediaan bahan barang cetakan dan penggandaan	Banjarbaru	Jumlah pengadaan yang tersedia	2 paket	12.100.000	Penyediaan bahan barang cetakan dan penggandaan	Banjarbaru	Jumlah pengadaan yang tersedia		11.000.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Banjarbaru	Jumlah bahan bacaan atau buku peraturan yang tersedia	4 dok	4.500.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Banjarbaru	Jumlah bahan bacaan atau buku peraturan yang tersedia		2.000.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Banjarbaru	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	80 Laporan	313.500.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Banjarbaru	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan		150.000.000	
	Kegiatan : Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah		Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan	100%	450.700.000	Kegiatan : Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Banjarbaru	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan			
	Pengadaan Mebel	Banjarbaru	Jumlah mebel yang dibeli	52 unit	99.000.000	Pengadaan Mebel	Banjarbaru	Jumlah mebel yang dibeli		99.000.000	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Banjarbaru	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	29 unit	351.700.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Banjarbaru	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang		351.700.000	
	Kegiatan : Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah yang dapat difasilitasi	100%	373.929.000	Kegiatan : Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah yang dapat difasilitasi			
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Banjarbaru	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik lainnya yang dapat digunakan	3 lap	150.000.000	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Banjarbaru	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik lainnya yang dapat digunakan		150.000.000	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Banjarbaru	Jumlah pegawai administrasi kantor non ASN aktif	66 laporan	223.929.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Banjarbaru	Jumlah pegawai administrasi kantor non ASN aktif		192.033.480	

	Kegiatan : Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah		Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	100%	609.000.000	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah		Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik			
	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Banjarbaru	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	1 unit	38.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Banjarbaru	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		38.000.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Banjarbaru	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	14 unit	100.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Banjarbaru	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		100.000.000	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Banjarbaru	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	56 unit	40.000.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Banjarbaru	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		40.000.000	
	Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Banjarbaru	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	400.000.000	Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Banjarbaru	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara		400.000.000	
			Fasilitasi sesuai kemampuan			gedung kantor dan bangunan lainnya		bangunan lainnya yang dipelihara			
	Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Banjarbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	34 unit	31.000.000	Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Banjarbaru			31.000.000	
	Program Pemberdayaan Sosial	Banjarbaru	Persentase Pekerja Sosial, Tenga Kesejahteraan Sosial Keluarga, Tenaga Sumber Kesejahteraan Kelembagaan Masyarakat dan LK3 yang Memperoleh	100%	449.089.000	Program Pemberdayaan Sosial	Banjarbaru	Persentase Pekerja Sosial, Tenga Kesejahteraan Sosial Keluarga, Tenaga Sumber Kesejahteraan Kelembagaan Masyarakat dan LK3 yang Memperoleh			
	Kegiatan : Pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaksanaan pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota	100%	35.000.000	Kegiatan : Pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota	Banjarbaru	Persentase pelaksanaan pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota			
	Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Banjarbaru	Jumlah rekomendasi izin undian gratis berhadiah pengumpulan uang atau barang yang diterbitkan	15 dok	35.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Banjarbaru	Jumlah rekomendasi izin undian gratis berhadiah pengumpulan uang atau barang yang diterbitkan		35.000.000	

	Kegiatan : Pengembangan Sumber Potensi Kesejahteraan Sosial		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang ditingkatkan kemampuannya	100%	414.089.000	Kegiatan : Pengembangan Sumber Potensi Kesejahteraan Sosial	Banjarbaru	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang ditingkatkan kemampuannya			
	Peningkatan kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Kabupaten /Kota	Banjarbaru	Jumlah PSM yang ditingkatkan kemampuannya	60 org	162.000.000	Peningkatan kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Kabupaten /Kota	Banjarbaru	Jumlah PSM yang ditingkatkan kemampuannya		162.000.000	
	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan Kabupaten/Kota	Banjarbaru	Jumlah TKSK yang ditingkatkan kemampuannya	5 org	40.000.000	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan Kabupaten/Kota	Banjarbaru	Jumlah TKSK yang ditingkatkan kemampuannya		40.000.000	
	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan Kabupaten/kota	Banjarbaru	Jumlah PSKS yang ditingkatkan kemampuannya	5 Lembaga	190.793.000	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan Kabupaten/kota	Banjarbaru	Jumlah PSKS yang ditingkatkan kemampuannya		190.793.000	
	Peningkatan Kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	Banjarbaru	Jumlah LK3 yang dibina	15 sertifikat	21.296.000	Peningkatan Kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	Banjarbaru	Jumlah LK3 yang dibina		21.296.000	
III	Program Rehabilitasi Sosial	Banjarbaru	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	2.299.851.000	Program Rehabilitasi Sosial	Banjarbaru	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			
	Kegiatan : Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti		Persentase bantuan pemenuhan kebutuhan dasarnya yang diberikan diluar panti	100%	1.280.120.000	Kegiatan : Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti	Banjarbaru	Persentase bantuan pemenuhan kebutuhan dasarnya yang diberikan diluar panti			
	Penyediaan permakanan	Banjarbaru	Jumlah permakanan yang disediakan bagi penyandang Disabilitas Terlantar , anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng menerima paket permakanan	60 orang	1.113.000.000	Penyediaan permakanan	Banjarbaru	Jumlah permakanan yang disediakan bagi penyandang Disabilitas Terlantar , anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng menerima paket permakanan		1.113.000.000	

	Penyediaan alat bantu	Banjarbaru	Jumlah alat bantu yang diberikan kepada penyandang disabilitas	65 orang	0	Penyediaan alat bantu	Banjarbaru	Jumlah alat bantu yang diberikan kepada penyandang disabilitas	0	
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial	Banjarbaru	Jumlah penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, dan sosial	0	0	Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial	Banjarbaru	Jumlah penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, dan sosial	0	
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Banjarbaru	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat	50 orang	36.280.000	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Banjarbaru	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat	36.280.000	
	Pemberian layanan kedaruratan	Banjarbaru	Jumlah orang miskin dan terlantar yang diberi pelayanan kedaruratan	15 orang	130.840.000	Pemberian layanan kedaruratan	Banjarbaru	Jumlah orang miskin dan terlantar yang diberi pelayanan kedaruratan	130.840.000	
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukar korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial		Persentase bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS di luar panti	100%	1.019.731.000	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukar korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial	Banjarbaru	Persentase bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS di luar panti		
	Pemberian layanan data dan pengaduan	Banjarbaru	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	103.136.000	Pemberian layanan data dan pengaduan	Banjarbaru	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan Kabupaten/Kota	103.136.000	
	Penyediaan Permakanan	Banjarbaru	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan kebutuhan Permakanan Sesuai dengan standar Gizi minimal kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	375.000.000	Penyediaan Permakanan	Banjarbaru	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan kebutuhan Permakanan Sesuai dengan standar Gizi minimal kewenangan Kabupaten/Kota	350.000.000	
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Banjarbaru	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	20 orang	16.499.000	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Banjarbaru	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	16.499.000	

	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Banjarbaru	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	4 orang	150.000.000	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Banjarbaru	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		150.000.000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi keluarga	Banjarbaru	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	82.498.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi keluarga	Banjarbaru	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		82.498.000	
	Pemberian layanan rujukan	Banjarbaru	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten / Kota	20 orang	226.599.000	Pemberian layanan rujukan	Banjarbaru	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten / Kota		226.599.000	
	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kabupaten/Kota	Banjarbaru	Jumlah Dokumen hasil kerjasama antar lembaga dan kemitraan kewenangan Kabupaten/Kota	3 dok	65.999.000	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kabupaten/Kota	Banjarbaru	Jumlah Dokumen hasil kerjasama antar lembaga dan kemitraan kewenangan Kabupaten/Kota		65.999.000	
IV	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Banjarbaru	Persentase Anak terlantar yang dipelihara	100%	1.065.613.000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase Anak terlantar yang dipelihara			
	Kegiatan : Pemeliharaan anak-anak terlantar		Persentase anak terlantar yang dipelihara di Kota Banjarbaru	100%	171.599.000	Kegiatan : Pemeliharaan anak-anak terlantar	Banjarbaru	Persentase anak terlantar yang dipelihara di Kota Banjarbaru			
	Penjangkauan anak-anak terlantar	Banjarbaru	Jumlah anak terlantar yang dijangkau	20 orang	49.499.000	Penjangkauan anak-anak terlantar	Banjarbaru	Jumlah anak terlantar yang dijangkau		49.499.000	
	Rujukan anak –anak terlantar	Banjarbaru	Jumlah anak terlantar yang dirujuk	402 orang	122.100.000	Rujukan anak –anak terlantar	Banjarbaru	Jumlah anak terlantar yang dirujuk		122.100.000	
	Kegiatan : Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data fakir miskin yang dikelola	100%	895.014.000	Kegiatan : Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Banjarbaru	Persentase data fakir miskin yang dikelola			
	Pendataan fakir miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Banjarbaru	Jumlah fakir miskin cakupan daerah kabupaten / Kota yang di data	7.726 orang	133.375.000	Pendataan fakir miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Banjarbaru	Jumlah fakir miskin cakupan daerah kabupaten / Kota yang di data		133.375.000	
	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten / kota	Banjarbaru	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota	5.462 Keluarga	266.640.000	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten / kota	Banjarbaru	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota		266.640.000	

	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Banjarbaru	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	2.572 Keluarga	494.999.000	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Banjarbaru	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota		494.999.000	
V	Program Penanganan Bencana	Banjarbaru	Meningkatnya pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial	100%	475.019.500	Program Penanganan Bencana	Banjarbaru	Meningkatnya pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial			
	Kegiatan : Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	220.272.000	Kegiatan : Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Banjarbaru	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
	Penyediaan makanan	Banjarbaru	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota	4.000 orang	192.500.000	Penyediaan makanan	Banjarbaru	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota		192.500.000	
	Penyediaan sandang	Banjarbaru	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	16.498.000	Penyediaan sandang	Banjarbaru	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan Kabupaten/Kota		16.498.000	
	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Banjarbaru	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	0	0	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Banjarbaru	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota		0	
	Pelayanan dukungan Psikososial	Banjarbaru	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial kewenangan kabupaten/kota	60 orang	11.274.000	Pelayanan dukungan Psikososial	Banjarbaru	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial kewenangan kabupaten/kota		11.274.000	

	Kegiatan : Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota		Persentase masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana alam dan sosial	100%	160.520.000	Kegiatan : Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota	Banjarbaru	Persentase masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana alam dan sosial			
	Koordinasi sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Banjarbaru	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencanakewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	160.520.000	Koordinasi sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Banjarbaru	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencanakewenangan Kabupaten/Kota		160.520.000.	
					11.070.896.821					11.070.896.821	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah dan wakil kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Sementara itu, arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah dan wakil kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Sosial Kota Banjarbaru melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran target kinerja yang dibebankan dalam RPJMD Kota Banjarbaru 2021-2026 secara efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kota Banjarbaru selanjutnya dituangkan secara lebih rinci sesuai dengan sasaran yang akan dicapai yaitu sebagai berikut :

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial

Tujuan yang telah dirumuskan dalam RPJMD ada pada misi 1 dan misi 2 yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah :

- a. Misi 1 Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia

Tujuan terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing berlandaskan nilai agama dan budaya

Sasaran Meningkatnya keamanan, kenyamanan, kesadaran hukum dan ketertiban masyarakat berlandaskan budaya

- b. Misi 2 Meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan lokal dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup

Tujuan terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata dan meningkatnya ketersediaan pangan daerah dengan sasaran menurunnya kemiskinan

Adapun Tujuan dan Sasaran yang termasuk dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatkan Penanganan Korban Bencana	Meningkatnya pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial pada saat tanggap darurat bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah
2	Menurunnya kemiskinan	Meningkatnya kemampuan PSKS kelembagaan masyarakat dan LK3	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan keluarga, tenaga sumber kesejahteraan kelembagaan masyarakat dan LK3 yang memperoleh fasilitas peningkatan kemampuan
		Meningkatnya pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta serta gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar dan fakir miskin	Persentase anak terlantar yang dipelihara
			Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial, kesejahteraan keluarga dan pengembangan ekonomi masyarakat.

3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial

Pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru terdapat beberapa bidang yang melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial Berikut penjelasan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Banjarbaru :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Pengadaan Mebel
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pemberdayaan Sosial

- a. Kegiatan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

- b. Kegiatan Pengembangan Sumber Potensi Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 3) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- 4) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

3. Program Rehabilitasi Sosial

- a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Permakanan
- 2) Penyediaan Alat Bantu
- 3) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

- 4) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
- 5) Pemberian Layanan Kedaruratan
- b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Permakanan
 - 2) Pemberian Layanan data dan Pengaduan
 - 3) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - 4) Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga
 - 5) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - 6) Pemberian Layanan Rujukan
 - 7) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- a. Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar
Sub Kegiatan :
 - 1) Rujukan Anak-anak Terlantar
 - 2) Penjangkauan Anak-anak Terlantar
- b. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - 3) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Penanganan Bencana

- a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Makanan
 - 2) Penyediaan Sandang

- 3) Pelayanan Dukungan Psikososial
- 4) Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan :
 - 1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024 DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	Banjarbaru	100%	6.874.551.821	PAD		100%	7.542.757.353
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Banjarbaru	100%	36.965.500	PAD		100%	40.663.000
	Sub Kegiatan :								
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banjarbaru	2 Dokumen	22.286.000	PAD		2 Dokumen	24.515.000
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banjarbaru	2 Laporan	14.679.500	PAD		2 Laporan	16.148.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Banjarbaru	100%	4.825.489.321	PAD		100%	5.308.037.453
	Sub Kegiatan								
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Banjarbaru	50 Orang/Bulan	4.819.831.321	PAD		50 Orang/Bulan	5.301.814.453
	2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Banjarbaru	1 Laporan	5.658.000	PAD		1 Laporan	6.223.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Banjarbaru	100%	0	PAD		100%	0
	Sub Kegiatan								
	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai dan Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Banjarbaru	0	0	PAD		0	0
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Banjarbaru	100%	24.970.000	PAD		100%	27.467.000
	Sub Kegiatan								
	1 Rekonsialisasi dan Penyusunan Laporb Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsialisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Banjarbaru	1 Laporan	24.970.000	PAD		1 Laporan	27.467.000

	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Banjarbaru	100%	553.495.000	PAD		100%	608.848.000
	Sub Kegiatan								
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Banjarbaru	2 Paket	25.300.000	PAD		2 Paket	27.830.000
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Banjarbaru	4 Paket	198.098.000	PAD		4 Paket	217.908.000
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Banjarbaru	2 Paket	12.100.000	PAD		2 Paket	13.310.000
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Banjarbaru	4 Dokumen	4.500.000	PAD		4 Dokumen	4.950.000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banjarbaru	80 Laporan	313.500.000	PAD		80 Laporan	344.850.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Banjarbaru	100%	450.700.000	PAD		100%	483.120.000
	Sub Kegiatan								
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	Banjarbaru	10 unit	1.262.060.000	PAD		10 unit	1.287.302.000
2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Banjarbaru	52 Unit	99.000.000	PAD		52 Unit	96.250.000
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Banjarbaru	29 Unit	351.700.000	PAD		29 Unit	386.870.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Banjarbaru	100%	373.929.000	PAD		100%	404.721.900
	Sub Kegiatan								
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Banjarbaru	3 Laporan	150.000.000	PAD		3 Laporan	158.400.000
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Banjarbaru	66 Laporan	223.929.000	PAD		66 Laporan	246.321.900
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Banjarbaru	100%	609.000.000	PAD		100%	669.900.000
	Sub Kegiatan		Banjarbaru						
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Banjarbaru	1 Unit	38.000.000	PAD		1 Unit	41.800.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Banjarbaru	14 Unit	87.868.000	PAD		14 Unit	96.654.800

	Lapangan								
	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Banjarbaru	25 Unit	23.394.800	PAD		27 Unit	25.734.280
	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Banjarbaru	1 Unit	576.994.000	PAD		1 Unit	634.693.400
	5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Banjarbaru	8 Unit	5.500.000	PAD		10 Unit	6.050.000
II	Program Pemberdayaan Sosial		Banjarbaru	100%	449.089.000	PAD		100%	484.555.000
	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Banjarbaru	100%	35.000.000	PAD		100%	38.500.000
	Sub Kegiatan								
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Banjarbaru	15 Dokumen	35.000.000	PAD		15 Dokumen	38.500.000
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Banjarbaru	100%	414.089.000	PAD		100%	446.055.000
	Sub Kegiatan								
	1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Banjarbaru	60 Orang	162.000.000	PAD		60 Orang	178.200.000
	2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Banjarbaru	5 Orang	40.000.000	PAD		5 Orang	43.558.000
	3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Banjarbaru	5 Lembaga	190.793.000	PAD		5 Lembaga	200.872.000
	4 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Banjarbaru	15 Sertifikat	21.296.000	PAD		15 Sertifikat	23.425.600

III	Program Rehabilitasi Sosial		Banjarbaru	100%	2.299.851.000	PAD		100%	2.529.833.000
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Banjarbaru	100%	1.280.120.000	PAD		100%	1.408.132.000
	Sub Kegiatan								
	1 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Banjarbaru	60 Orang	1.113.000.000	PAD		60 Orang	1.224.300.000
	2 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Banjarbaru	0 Orang	0	PAD		0 Orang	0
	3 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Banjarbaru	50 Orang	36.280.000	PAD		50 Orang	39.908.000
	4 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Banjarbaru	15 Orang	130.840.000	PAD		15 Orang	143.924.000
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Banjarbaru	100%	1.019.731.000	PAD		100%	1.121.701.000
	Sub Kegiatan								
	1 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Banjarbaru	20 Orang	103.136.000	PAD		20 Orang	113.449.000
	2 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Banjarbaru	150 Orang	375.000.000	PAD		150 Orang	412.500.000
	3 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Banjarbaru	4 Orang	150.000.000	PAD		4 Orang	165.000.000

	4	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Banjarbaru	20 Orang	16.499.000	PAD		20 Orang	18.148.000
	5	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Banjarbaru	20 Orang	82.498.000	PAD		20 Orang	90.748.000
	6	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Banjarbaru	20 Orang	226.599.000	PAD		20 Orang	249.258.000
	7	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Banjarbaru	3 Dokumen	65.999.000	PAD		3 Dokumen	72.598.000
IV	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			Banjarbaru	100%	1.066.613.000	PAD		100%	1.173.272.000
	Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar			Banjarbaru	100%	171.599.000	PAD		100%	188.758.000
	Sub Kegiatan									
	1	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Banjarbaru	20 orang	49.499.000	PAD		20 Orang	54.448.000
	2	Rujukan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Banjarbaru	402 Orang	122.100.000	PAD		402 Orang	134.310.000
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			Banjarbaru	100%	895.014.000	PAD		100%	984.514.000
	Sub Kegiatan									
	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Banjarbaru	7.726 Orang	133.375.000	PAD		7.726 Orang	146.712.000
	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Banjarbaru	5.462 Keluarga	266.640.000	PAD		5.462 Keluarga	293.304.000
	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Banjarbaru	2.572 Keluarga	494.999.000	PAD		2.572 Keluarga	544.498.000
V	Program Penanganan Bencana			Banjarbaru	100%	380.792.000	PAD		100%	418.870.000
	Kegiatan Perlindungan Sosial korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			Banjarbaru	100%	220.272.000	PAD		100%	242.298.000
	Sub Kegiatan									
	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Banjarbaru	4.000 Orang	192.500.000	PAD		4.500 Orang	211.750.000

	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada masa Tanggap Darurat (pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Banjarbaru	60 Orang	16.498.000	PAD		60 Orang	18.147.000
	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Banjarbaru	0 Unit	0	PAD		0 Unit	0
	4	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Banjarbaru	60 Orang	11.274.000	PAD		60 Orang	12.401.000
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			Banjarbaru	100%	160.520.800	PAD		100%	176.572.000
	Sub Kegiatan									
	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Banjarbaru	30 Orang	160.520.800	PAD		35 Orang	176.572.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosia Kota Banjarbaru yang didalamnya mencakup penjabaran visi, misi, tujuan, kebijakan program dan kegiatan dinas yang disusun secara tahunan ini agar dapat dipakai sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan dibidang sosial.

Rencana Kinerja ini terlaksana apabila mendapat perhatian semua pihak dan tersedianya anggaran. Adanya renja ini diharapkan agar Dinas Sosial Kota Banjarbaru serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan responsif.

